SciNusa
JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
SciNusa
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 3 No. 02 Tahun 2026 Page [88-102]
OPEN ACCESS
ISSN 3123-5522

Internalisasi Nilai Pancasila dalam Merespons Keberagaman Ekspresi Gender: Studi Fenomenologis pada Mahasiswa

[1]Risky Andre Agustin Siahaan, [2]Shafira Sasri Mawaddah, [3]Gebi Spani Hutapea, [4]Mastuti Telaumbanua, [5]Amanda Aulia Putri, [6]Betris Veronica Br Barus, [7]Alfany Hermanto Pandiangan
[1-7]Universitas Negeri Medan, Indonesia
E-mail: shafirasasrimawaddah@gmail.com

Abstrak
Kampus sebagai ruang publik yang plural tidak lepas dari dinamika stigmatisasi terhadap ekspresi gender yang berbeda dari norma maskulinitas dominan, salah satunya melalui pelabelan "boti" pada mahasiswa laki-laki yang tampil feminin. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana mahasiswa Universitas Negeri Medan memaknai fenomena tersebut dan bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua, hadir dalam sikap dan interaksi mereka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi deskriptif (Husserlian) dengan analisis data model Colaizzi (1978). Partisipan berjumlah delapan mahasiswa yang dipilih secara purposif dari berbagai program studi dan angkatan, dan data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur berbasis delapan pertanyaan. Analisis menghasilkan lima tema: (1) kehadiran mahasiswa berlabel "boti" dimaknai pada spektrum dari hal biasa hingga penerimaan bersyarat; (2) label diberikan berdasarkan penanda ekspresi seperti cara bicara, berpakaian, dan pergaulan, bukan berdasarkan pengetahuan tentang identitas orangnya; (3) interaksi sehari-hari umumnya cair, tetapi disertai ambivalensi; (4) sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai secara beragam, mulai dari dasar untuk tidak menghakimi hingga kerangka koreksi normatif; dan (5) sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dipahami hampir seragam sebagai dasar penolakan terhadap penghinaan. Struktur esensial pengalaman partisipan adalah internalisasi yang kuat pada tataran adab interpersonal namun belum utuh pada tataran penerimaan terhadap ekspresi itu sendiri. Temuan ini menjadi bahan evaluasi implementasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi agar nilai toleransi dan penghargaan tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif.

Kata kunci: Internalisasi Nilai Pancasila; Ekspresi Gender; Stigma "Boti"; Fenomenologi; Mahasiswa

Abstract
Campuses, as plural public spaces, are not free from the stigmatization of gender expressions that deviate from dominant masculinity norms, one of which is the labelling of feminine-presenting male students as "boti". This study examines how students of Universitas Negeri Medan make sense of this phenomenon and how Pancasila values, especially the first and second principles, appear in their attitudes and interactions. Using descriptive (Husserlian) phenomenology and Colaizzi's (1978) analytic procedure, we interviewed eight purposively selected students from different study programs and cohorts using a semi-structured guide of eight questions. Five themes emerged: (1) the presence of "boti"-labelled students is understood on a spectrum from ordinary to conditional acceptance; (2) the label is attached on the basis of expressive markers rather than knowledge of the person; (3) everyday interaction is generally relaxed but ambivalent; (4) the value of Belief in One Supreme God is interpreted in plural ways, from grounds for non-judgment to a frame for normative correction; and (5) the value of Just and Civilized Humanity is almost uniformly read as a basis for rejecting insults. The essential structure of the experience is strong internalization at the level of interpersonal civility but incomplete acceptance of the expression itself. The findings offer material for evaluating Pancasila education in higher education so that tolerance and respect do not remain merely normative knowledge.

Keywords: *internalization of Pancasila values; gender expression; "boti" stigma; phenomenology; university students*

PENDAHULUAN

Urgensi sosial-kampus. Kampus adalah ruang publik yang plural: mahasiswa dari beragam suku, agama, kelas sosial, dan latar budaya berinteraksi setiap hari. Justru karena itu, kampus juga menjadi arena tempat norma-norma dominan bekerja, termasuk norma tentang bagaimana laki-laki "seharusnya" tampil. Laki-laki yang bertutur lembut, berpenampilan rapi dan berias, atau bergaul akrab dengan teman perempuan kerap menghadapi pelabelan, ejekan, bahkan pengucilan. Salah satu label yang paling sering muncul dalam percakapan mahasiswa adalah "boti". Istilah ini berasal dari bahasa gaul komunitas gay, yaitu adaptasi dari kata bottom, tetapi dalam penggunaan sehari-hari maknanya bergeser menjadi cap bagi laki-laki feminin tanpa memandang orientasi seksualnya (Solikhin & Hanjani, 2025). Fenomena ini sudah menjadi bagian dari wacana keseharian mahasiswa. Salsabila dan Idrus (2025) menunjukkan bahwa julukan "boti" di lingkungan kampus beroperasi sebagai pelabelan yang merendahkan dan berdampak pada relasi sosial, rasa percaya diri, hingga prestasi akademik mahasiswa yang dilabeli. Di ruang digital, istilah yang sama berfungsi sebagai instrumen simbolik yang mempertahankan hierarki maskulinitas (Silaban dkk., 2026). Namun riset akademik yang mengkaji fenomena ini secara sistematis dari sudut pandang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) masih terbatas.

Urgensi teoretis. Kajian PPKn arus utama banyak membahas toleransi dalam kerangka keberagaman agama dan etnis. Ekspresi gender dan stigma yang menyertainya jarang diperlakukan sebagai uji nyata prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Padahal literatur tentang gender di Indonesia telah menunjukkan bahwa laki-laki feminin menghadapi stereotip dan kontrol sosial yang bersumber dari konstruksi maskulinitas yang kaku (Khavifah dkk., 2022; Anindya, 2018), serta bahwa sikap lingkungan terdekat sangat memengaruhi pengalaman mereka (Hisyam dkk., 2024). Perempuan yang berekspresi maskulin pun tidak lepas dari penilaian normatif, baik yang bersifat sosial (Erpidawati, 2017), religius-hukum (Wahyuni, 2023), maupun

representasional (Prasetyo & Indrastuti, 2026; Paramita & Chaniago, 2018). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan pelabelan "boti" sebagai fenomena sosial yang menguji konsistensi nilai kewarganegaraan mahasiswa, yaitu apakah nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan benar-benar hadir dalam cara mereka memaknai dan menyikapi sesama.

Urgensi praktis-kebijakan. Pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan merupakan kurikulum wajib pendidikan tinggi (UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 3). Jaminan konstitusional atas perlakuan bebas dari diskriminasi (UUD 1945 Pasal 28I ayat 2) dan kewajiban menghormati hak orang lain (Pasal 28J ayat 2) juga menjadi kerangka yang relevan bagi kehidupan kampus (Silaban dkk., 2026). Temuan penelitian ini dapat menjadi basis evaluasi implementasi pendidikan Pancasila/PPKn di perguruan tinggi: apakah nilai toleransi dan penghargaan terhadap sesama benar-benar terinternalisasi, atau baru sebatas pengetahuan normatif tanpa transfer ke sikap nyata.

METODE PENELITIAN

Pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi deskriptif (Husserlian). Pendekatan ini dipilih secara konsisten sampai ke teknik analisis data karena tujuan penelitian adalah menangkap esensi pengalaman dan pemaknaan mahasiswa sebagaimana mereka sendiri mengalaminya, bukan menguji hipotesis. Peneliti berupaya menunda (bracketing) prasangka dan pandangan pribadi mengenai topik ini selama pengumpulan dan analisis data (Creswell & Poth, 2018).

Partisipan. Partisipan berjumlah delapan mahasiswa Universitas Negeri Medan, jumlah yang berada dalam rentang lazim untuk studi fenomenologi (6–12 orang). Pemilihan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: (a) mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan; (b) pernah melihat atau berinteraksi dengan mahasiswa yang dilabeli "boti" di lingkungan kampus; dan (c) bersedia berpartisipasi secara sukarela. Untuk menghindari

penangkapan satu sudut pandang saja, dipertimbangkan keragaman program studi dan angkatan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Identitas partisipan disamarkan dengan kode R1–R8.

Tabel 1. Karakteristik partisipan

Kode	Program studi	Angkatan
R1	Teknik Mesin	[diisi]
R2	IPA	2024
R3	PSPF	2025
R4	Ilmu Ekonomi	2026
R5	PSF	2025
R6	Kimia	2023
R7	PSPF, kelas D	2025
R8	Kimia	2023

Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam menggunakan pedoman delapan pertanyaan terbuka yang mencakup persepsi terhadap keberadaan mahasiswa berlabel "boti", alasan pelabelan, pengalaman interaksi, penerapan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kesesuaian pelabelan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sikap terhadap ejekan, penilaian atas sikap mahasiswa saat ini, serta harapan terhadap lingkungan kampus. Wawancara dilaksanakan pada [bulan/tahun] dengan durasi rata-rata [..] menit per partisipan dalam [..] sesi, secara [tatap muka/daring]. Observasi partisipatif tidak digunakan karena fokus penelitian adalah pemaknaan partisipan.

Analisis data. Analisis mengikuti tujuh langkah Colaizzi (1978) untuk fenomenologi deskriptif: (1) membaca seluruh transkrip berulang kali untuk memperoleh rasa keseluruhan; (2) mengekstraksi pernyataan signifikan; (3) merumuskan makna dari setiap pernyataan; (4) mengelompokkan makna ke dalam kategori dan tema; (5) menyusun deskripsi menyeluruh (exhaustive description); (6) merumuskan struktur esensial fenomena; dan (7) memvalidasi hasil kepada partisipan.

Keabsahan data. Kredibilitas dijaga melalui member checking, yaitu pengecekan ulang interpretasi kepada partisipan. Dependabilitas dijaga melalui jejak audit (audit trail) berupa transkrip, kode, dan catatan keputusan

analisis. Konfirmabilitas dijaga melalui refleksivitas. Karena topik ini sensitif, posisi peneliti (positionality) dinyatakan secara terbuka: seluruh peneliti adalah mahasiswa Program Studi Fisika angkatan 2025 dan bukan berlatar belakang PPKn atau kajian gender, serta tidak mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok yang dilabeli. Posisi ini memungkinkan jarak analitis, tetapi juga berisiko kurang peka terhadap pengalaman kelompok yang dilabeli, sehingga interpretasi senantiasa dikembalikan pada kata-kata partisipan.

Pernyataan etik. Seluruh partisipan memperoleh penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian, memberikan persetujuan tertulis (informed consent), dan dijamin anonimitasnya melalui penggunaan kode. Partisipan berhak menghentikan keikutsertaan kapan saja tanpa konsekuensi. Karena topik menyentuh identitas gender yang berpotensi sensitif, pertanyaan dirumuskan sebagai pandangan partisipan terhadap fenomena, bukan penilaian terhadap individu tertentu, dan tidak ada nama pihak ketiga yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Delapan partisipan menjawab delapan pertanyaan wawancara. Berdasarkan langkah Colaizzi, pernyataan signifikan dikelompokkan menjadi lima tema, ditambah satu bagian temuan reflektif tentang penilaian partisipan atas sikap mahasiswa dan harapan mereka bagi kampus. Kutipan disajikan dengan penyuntingan ejaan seperlunya tanpa mengubah makna.

Tabel 2. Ringkasan tema dan sebaran partisipan

Tema	Inti temuan	Partisipan
1. Kehadiran mahasiswa berlabel "boti"	Spektrum: hak setara, penerimaan bersyarat, kritik atas pelabelan	R1, R5, R7 (hak setara); R2, R4, R6, R8 (bersyarat); R3 (kritik label)
2. Penanda pelabelan	Cara bicara, berpakaian/berias, pergaulan, dan "tingkah laku" dijadikan dasar label	Cara bicara: R1, R2, R4, R6, R7; berpakaian/berias : R2, R6, R7;

		pergaulan: R1, R2, R4, R7, R8
3. Interaksi dan sikap terhadap ejekan	Interaksi umumnya cair namun ambivalen; sikap terhadap ejekan beragam	Cair: R1, R3, R4, R5, R6, R7; ambivalen: R2, R5, R6, R8
4. Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa	Dasar tidak menghakimi dan mengasihi, atau kerangka koreksi normatif	Tidak menghakimi/mengasihi: R2, R3, R5; koreksi: R4, R6, R7, R8; R1 merujuk sila kelima
5. Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Pelabelan dinilai tidak sesuai dengan sila kedua	Eksplisit: R2, R3, R4, R5, R7; implisit: R1, R8; ambivalen: R6

Kehadiran mahasiswa berlabel "boti" dimaknai pada spektrum dari hal biasa hingga penerimaan bersyarat

Tiga partisipan memandang kehadiran mahasiswa berlabel "boti" sebagai hal wajar. R1 menyebutnya "hal biasa kali ya, karena itu kan gimana orang berekspresi soal penampilan dia". R5 menegaskan bahwa "kampus itu tempat belajar, jadi semua orang berhak untuk berkuliah dan berkembang" selama tidak melanggar aturan akademik, dan R7 memandangnya "hanya ekspresi gender" yang tidak memengaruhi perkuliahan.

Partisipan lain menunjukkan penerimaan yang bersyarat. R2 mengaku "kurang menormalisasikan" tetapi tetap menyatakan bahwa sesama manusia harus dihargai tanpa menghina atau mengejek. R4 dapat berinteraksi "selagi sikapnya tidak menyimpang". R6 menyatakan kehadiran mereka tidak meresahkan, "cuma rada tidak suka aja melihat boti". R8 memandang teman perlu merangkul agar yang bersangkutan tidak diberi label, karena menurutnya "manusia normal hanya ada laki-laki dan perempuan".

R3 memberi pembacaan kritis atas pelabelan itu sendiri: label "boti" "agak diskriminasi" karena orang membuatnya berdasarkan perilaku yang tampak, "padahal kita tidak tahu dia itu seperti apa aslinya". R4 juga menyoroti bahwa pemberian label "tidak bagus bagi mental" orang yang diejek karena dapat membuatnya merasa "down".

Label diberikan berdasarkan penanda ekspresi, bukan pengetahuan tentang identitas orangnya

Partisipan menyebut serangkaian penanda yang membuat seseorang diberi label. Penanda yang paling sering disebut adalah cara bicara (R1, R2, R4, R6, R7), misalnya bicara "lemah gemulai" (R6) atau nada suara yang dianggap berbeda (R7). Penanda berikutnya adalah gaya berpakaian, riasan, dan perawatan kulit (R2, R6, R7), serta pergaulan, terutama kedekatan dengan teman perempuan (R1, R2, R4, R7, R8). R1 juga menyebut cara berjalan, dan R3 menyebut perilaku yang dianggap "manja" atau seperti "bencong".

Dua pola atribusi patut dicatat. Pertama, R7 menggunakan "skincare, make up" sebagai ciri, yang menunjukkan bahwa praktik perawatan diri pun dibaca sebagai penanda gender. Kedua, R8 mengaitkan perilaku tersebut dengan penyebab personal: "ada mungkin faktor trauma dari teman laki-lakinya, makanya lebih menjauhi laki-laki". Penjelasan semacam ini menempatkan sebab "penyimpangan" pada diri orang yang dilabeli, bukan pada norma yang digunakan untuk menilainya. Sementara itu R3 menegaskan bahwa label berangkat dari kesan luar, bukan pengetahuan tentang orangnya.

Interaksi sehari-hari cair, tetapi disertai ambivalensi

Pengalaman berinteraksi umumnya digambarkan positif atau netral. R1 menggambarkan interaksi itu "seru" dan orangnya "friendly, lebih enak diajak ngobrol". R5 pernah satu kelompok dan merasa orangnya "sangat asik". R6 menyebut mereka "enak diajak bicara". R3, R4, dan R7 menyebutnya "biasa aja".

Namun ambivalensi muncul pada beberapa partisipan. R5 mengaku "agak canggung" dan "kaget" pada momen tertentu. R6 menikmati berbicara dengan mereka, tetapi menambahkan "namanya boti tetap salah". R8 mengakui adanya "sedikit jijik atau kesal". R2 berinteraksi dengan baik dan sopan, tetapi menegaskan bahwa bersikap baik "bukan berarti saya mengikuti atau membenarkan perilakunya". Dengan demikian, kesantunan interpersonal berjalan bersama penilaian normatif yang belum sepenuhnya berubah.

Sikap terhadap ejekan juga beragam. R2, R4, R5, dan R8 akan menegur pengejek dengan baik; R5 menambahkan, "jangan tertawa dan jadikan kelucuan". R8 menilai bahwa "semakin kita ejek, boti itu makin menjauhi laki-laki". R3 memilih mengenali orangnya terlebih dahulu: jika label itu keliru, ia akan membela. R7 memilih mengingatkan dan menasihati. R1 menyatakan sikap itu "tergantung pribadinya". R6 tidak marah dan mengaku kadang ikut mengejek, "cuma jangan di depan boti itu biar tidak sakit hati".

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai secara beragam, dari dasar tidak menghakimi hingga kerangka koreksi normatif

Partisipan memaknai penerapan sila pertama dalam dua pola utama. Pola pertama menjadikan nilai Ketuhanan sebagai dasar untuk tidak menghakimi dan saling mengasihi. R3 menyatakan, "itu sudah urusannya sama Tuhan, jadi kita tidak ada hak untuk menghakimi". R5 menyatakan, "harusnya kita saling mengasihi bukan malah menghakimi". R2 menggabungkan penghargaan terhadap orang sebagai manusia dengan sikap berpegang pada ajaran agama yang diyakini, sambil menegaskan bahwa hal itu tidak membolehkan penghinaan.

Pola kedua memaknai sila pertama sebagai kerangka koreksi. R4 memandang bahwa ekspresi tersebut "agak menyimpang dari agama" sehingga teman perlu "diajarkan dan didukung agar berubah secara perlahan". R6 melihatnya sebagai kurang bersyukur atas ciptaan, dan R7 menyebutnya melanggar kodrat dari sisi ketuhanan, walau dari sisi psikologis ia "tidak ada salahnya" karena merupakan ekspresi gender. R8 mengajak "merangkul dengan cara agamis, pelan-pelan, sopan santun". Sementara itu R1 tidak merujuk sila pertama dan memilih sila kelima, keadilan sosial, sebagai rujukan: semua orang "berhak untuk berekspresi" dan lingkungan "harus adil untuk menerimanya".

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dipahami hampir seragam sebagai dasar penolakan terhadap penghinaan

Lima partisipan secara eksplisit menyatakan bahwa pemberian label atau stigma tidak sesuai dengan sila kedua (R2, R3, R4, R5, R7). Alasan yang diajukan konsisten: orang yang dilabeli "tetap manusia" (R4, R7), label itu merupakan diskriminasi dan penghinaan (R3), tindakannya "tidak beradab" (R5), dan perbedaan pandangan boleh disampaikan "tanpa mempermalukan" (R2). R4 menambahkan bahwa melabeli melanggar sila kedua "karena kita harus adil dan beradab juga". R1 dan R8 tidak menjawab secara langsung, tetapi argumennya sejalan: R1 menekankan keadilan dalam menerima, dan R8 menekankan adab sebagai nilai yang dijunjung di kampus dan masyarakat. R6 ambivalen: pelabelan "salah karena kita tidak boleh menghakimi", tetapi ia menganggap "dirinya sendiri yang membuat kita melabeli".

Temuan Reflektif: Penilaian atas Sikap Mahasiswa dan Harapan bagi Kampus

Enam partisipan menilai bahwa sikap mahasiswa terhadap fenomena ini belum, atau baru sebagian, mencerminkan nilai Pancasila (R2, R3, R4, R5, R7, R8). R5 menyebutnya "masih setengah atau masih berproses", R7 menyebut "kebanyakan tidak", dan R3 menyebut label itu "sangat tidak sesuai" dengan nilai Pancasila. R1 menilai lebih banyak mahasiswa memilih menerima, sedangkan R6 menggabungkan penilaian bahwa ekspresi itu "salah" dengan keharusan menghargai berdasarkan sila kelima.

Harapan partisipan terbagi tiga. Pertama, kampus yang terbuka dan aman tanpa penghinaan (R2, R3, R5, R7). R5 bahkan menyebut ejekan semacam ini "sudah termasuk bullying" sehingga perlu "batas atau hukuman". Kedua, pendekatan merangkul dan memberi arahan (R4, R8), dengan R8 menekankan bahwa kampus adalah lingkungan berpendidikan tempat mahasiswa berpikir kritis dan "saling merangkul". Ketiga, saling menghargai dengan batas agama, norma, dan etika (R2) atau selama yang bersangkutan tidak mengganggu (R6).

Struktur Esensial Pengalaman

Dari kelima tema, struktur esensial yang dapat dirumuskan adalah: mahasiswa menghormati orang yang dilabeli sebagai manusia dan menolak penghinaan secara verbal, tetapi penerimaan terhadap ekspresi itu sendiri masih bersyarat dan sering disertai keinginan untuk "meluruskan". Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab hadir kuat pada tataran adab interpersonal, sedangkan nilai Ketuhanan berfungsi ganda: ia dipakai untuk menahan penghakiman oleh sebagian partisipan, dan untuk membingkai koreksi oleh sebagian lainnya.

Pembahasan

Persepsi terhadap fenomena, Sebaran persepsi dari "hal biasa" hingga penerimaan bersyarat memperlihatkan kampus sebagai ruang yang ambivalen, sebagaimana digambarkan Salsabila dan Idrus (2025): satu sisi memfasilitasi kebebasan berekspresi, sisi lain tetap mereproduksi norma heteronormatif dalam interaksi sehari-hari. Penanda yang dipakai partisipan, yaitu cara bicara, gaya berpakaian, dan kedekatan dengan teman perempuan, sejalan dengan temuan Silaban dkk. (2026) bahwa penanda tubuh dan gaya komunikasi menjadi dasar label, serta temuan Khavifah dkk. (2022) bahwa gaya bicara, cara berjalan, dan penampilan laki-laki feminin kerap menjadi bahan ejekan. Dalam kerangka Goffman (1963), label bekerja dengan mereduksi seseorang menjadi satu atribut. Pernyataan R3 bahwa label dibuat tanpa mengetahui keadaan orangnya sejalan dengan catatan Solikhin dan Hanjani (2025) bahwa penggunaan istilah "boti" secara "asal tembak" menyamaratakan laki-laki feminin, padahal tidak semuanya adalah bagian dari komunitas asal istilah itu, dan dengan pernyataan korban stigma dalam studi Salsabila dan Idrus (2025) bahwa penampilan feminin tidak identik dengan orientasi tertentu. Atribusi R8 bahwa perilaku demikian bersumber dari "trauma" menunjukkan kecenderungan mencari sebab pada individu yang dilabeli, bukan mempertanyakan standar yang menilainya. Hal ini selaras dengan penjelasan Anindya (2018) tentang stereotip sebagai penanda batas antara yang dianggap "normal" dan "yang berbeda".

Hadirnya nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan, Hampir seluruh partisipan menempatkan sila kedua sebagai batas bagi perilaku melabeli, yang sejalan dengan pembacaan sila kedua sebagai basis penghormatan martabat manusia, bukan penghakiman moral individu (Notonagoro, 1975; Kaelan, 2002). Pemahaman ini juga konsisten dengan jaminan konstitusional atas perlakuan bebas dari diskriminasi dan kewajiban menghormati hak orang lain (UUD 1945 Pasal 28I ayat 2 dan 28J ayat 2), yang oleh Silaban dkk. (2026) dikaitkan dengan stigma "boti". Pemaknaan sila pertama lebih beragam. Pola "urusan Tuhan, kita tidak berhak menghakimi" (R3, R5) sejalan dengan pembedaan ranah iman dan ranah kewarganegaraan dalam kerangka teori. Pola "koreksi" (R4, R6, R7, R8) memperlihatkan hadirnya kerangka normatif-religius yang juga ditemukan dalam kajian lain di Sumatra mengenai gender nonkonformis, misalnya pembacaan hukum Islam atas perempuan tomboy di Sumatra Barat yang dilandasi falsafah adat basandi syarak (Wahyuni, 2023). Penelitian ini tidak menilai kebenaran teologis pandangan tersebut. Yang dicermati secara kewarganegaraan adalah bagaimana pandangan itu diterjemahkan ke dalam perlakuan: partisipan yang memegang pandangan korektif tetap menolak ejekan dan menekankan cara yang "pelan-pelan" dan "sopan". Ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dinegosiasikan secara aktif oleh partisipan, bukan diterapkan secara otomatis. R7, yang membedakan sisi ketuhanan dan sisi psikologis, menunjukkan negosiasi paling eksplisit.

Negosiasi toleransi, Pola interaksi yang cair namun ambivalen menunjukkan bahwa toleransi dinegosiasikan melalui batas-batas yang dibuat partisipan sendiri, seperti "selagi tidak menyimpang" (R4), "selama tidak mengganggu" (R6), atau "toleransi jangan salah diartikan" (R2). Temuan interaksi yang positif sejalan dengan gagasan Allport (1954) bahwa kontak langsung dapat melunakkan prasangka, dan dengan temuan Hisyam dkk. (2024) bahwa lingkungan pertemanan yang menerima memberi ruang aman bagi laki-laki feminin. Akan tetapi, kontak yang menyenangkan tidak otomatis

menghapus penilaian normatif, sebagaimana tampak pada R6 dan R8. Satu temuan perlu dicermati kritis: sikap R6 yang tidak marah, tetapi kadang ikut mengejek asal tidak di depan orangnya, memperlihatkan bahwa kesantunan dapat berhenti pada menjaga perasaan tanpa menolak stigma itu sendiri. Silaban dkk. (2026) menunjukkan bahwa ejekan dalam bentuk candaan tampak ringan namun menormalisasi stereotip. Sikap menegur dengan baik (R2, R4, R5, R8) dan membela setelah mengenali (R3) menunjukkan bentuk toleransi yang lebih aktif, sesuai dengan penekanan Ichilov (1998) bahwa kompetensi sipil dan sikap toleran merupakan hasil pendidikan, bukan sesuatu yang otomatis ada.

Pola internalisasi nilai Pancasila, Penilaian enam partisipan bahwa sikap mahasiswa "masih setengah" atau "belum sepenuhnya" mencerminkan nilai Pancasila menunjukkan bahwa partisipan sendiri melihat adanya jarak antara nilai yang diketahui dan sikap yang dijalankan. Pola ini dapat disebut internalisasi parsial. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab telah terinternalisasi pada tingkat adab interpersonal (tidak menghina, menegur dengan baik), tetapi penerimaan terhadap ekspresi gender itu sendiri belum utuh dan sebagian partisipan masih mengaitkan penerimaan dengan perubahan perilaku yang diinginkan. Pola "merangkul agar berubah" (R4, R8) memiliki kemiripan struktural dengan temuan Prasetyo dan Indrastuti (2026) bahwa normalisasi gender dapat bekerja melalui kasih sayang pertemanan, bukan paksaan: tidak ada antagonis, tetapi pilihan untuk tetap berbeda sambil diterima sepenuhnya tidak disediakan. Observasi R8 bahwa ejekan justru membuat yang bersangkutan semakin menjauh sejalan dengan temuan Erpidawati (2017) bahwa perempuan tomboy yang menjadi bahan ejekan akhirnya membentuk kelompok sendiri. Kajian tersebut perlu dibaca hati-hati karena sejumlah generalisasinya terhadap latar keluarga anggota tidak didukung data yang memadai. Dalam kerangka Kymlicka (1995) dan Banks (2008), temuan ini menunjukkan bahwa kewargaan bersama di kampus baru terwujud sepenuhnya bila perbedaan ekspresi dapat hadir tanpa harus

menunggu perubahan; jika tidak, penerimaan hanya berlaku bagi yang menyesuaikan diri.

Temuan ini juga memberi catatan bagi pendidikan Pancasila. Partisipan berasal dari program studi nonkependidikan PPKn, dan sebagian merujuk Pancasila dengan cepat sebagai sila-sila tertentu. Ini menandakan pengetahuan normatif tersedia, tetapi sebagian partisipan belum membedakan secara jernih antara keyakinan pribadi tentang benar atau salah dan kewajiban memperlakukan sesama secara beradab. Pembelajaran berbasis kasus nyata di kampus dapat membantu mahasiswa membedakan keduanya. Beberapa harapan partisipan, seperti kampus yang aman, batas yang jelas terhadap perundungan, dan budaya saling merangkul, sejalan dengan fungsi kampus sebagai ruang dialog yang menumbuhkan sikap toleran terhadap keberagaman (Salsabila & Idrus, 2025).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah partisipan hanya delapan orang dari satu universitas, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Kedua, seluruh partisipan berada pada posisi pengamat atau penanggap, sehingga suara mahasiswa yang dilabeli "boti" dan dosen belum tertangkap; studi lanjutan perlu melibatkan mereka. Ketiga, sebagian jawaban partisipan singkat, sehingga kedalaman eksplorasi terbatas dan perlu diperdalam melalui pertanyaan lanjutan. Keempat, peneliti bukan berlatar belakang PPKn atau kajian gender, sehingga triangulasi dengan ahli di bidang tersebut diperlukan pada tahap penyempurnaan.

KESIMPULAN

Pertama, mahasiswa memaknai kehadiran mahasiswa berlabel "boti" pada spektrum dari hal wajar, penerimaan bersyarat, hingga kritik terhadap pelabelan; label diberikan berdasarkan penanda ekspresi seperti cara bicara, berpakaian, dan pergaulan. Kedua, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab hadir hampir seragam sebagai dasar penolakan terhadap penghinaan, sedangkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai secara beragam, baik sebagai dasar untuk tidak menghakimi maupun sebagai kerangka koreksi normatif. Ketiga, toleransi dinegosiasikan melalui batas-batas yang dibuat partisipan sendiri; interaksi sehari-hari cair, tetapi disertai ambivalensi dan sikap yang tidak selalu berarti penolakan terhadap stigma. Keempat, pola internalisasi nilai Pancasila bersifat parsial: kuat pada adab interpersonal, namun penerimaan terhadap ekspresi gender itu sendiri belum utuh. Hasil ini menjadi bahan evaluasi bahwa nilai toleransi dan penghargaan perlu ditransfer dari pengetahuan normatif ke sikap nyata.

Saran. Bagi dosen dan pengelola pendidikan Pancasila/PPKn, disarankan menggunakan pembelajaran berbasis kasus yang membedakan keyakinan pribadi dan perlakuan terhadap sesama warga kampus. Bagi pimpinan kampus, disarankan memperjelas kode etik dan mekanisme pencegahan perundungan verbal sebagai ruang aman bagi seluruh mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan mahasiswa yang dilabeli, dosen, dan pengelola kampus, serta memperluas jumlah partisipan dan lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

Anindya, A. (2018). Krisis maskulinitas dalam pembentukan identitas gender pada aktivitas komunikasi. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 2*(1), 24–34.

Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher, 37*(3), 129–139.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. S. Valle & M. King (Eds.), *Existential-phenomenological alternatives for psychology* (pp. 48–71). Oxford University Press.

Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. *Gender & Society, 19*(6), 829–859.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Erpidawati. (2017). Aktifitas kelompok serbis di Kota Padang. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 16*(1), 76–83.

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.

Hisyam, C. J., Restanova, V. B., Puspita, D. A., Rismayanti, & Putri, S. S. (2024). Konstruksi sosial dalam transformasi laki-laki menjadi feminin. *Ijtimaiyah: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 8*(2), 96–112.

Ichilov, O. (Ed.). (1998). *Citizenship and citizenship education in a changing world*. Woburn Press.

Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.

Khavifah, N., Lubis, F. O., & Oxcygentri, O. (2022). Konstruksi sosial stereotip laki-laki feminin (studi kasus pada laki-laki feminin di Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8*(22), 510–518.

Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.

Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjoran Tudjuh.

Paramita, S., & Chaniago, A. Z. (2018). Representasi identitas tomboy dalam film Inside Out. [Lengkapi nama jurnal dan volume], 473–501.

Prasetyo, T., & Indrastuti, N. S. K. (2026). Tomboy and feminine representations: Gender standards in children's literature written by children in the comics Next G. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, 12*(3), 2398–2412.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Salsabila, N. S., & Idrus, N. I. (2025). Boti: Stigma terhadap laki-laki feminin di lingkungan kampus. *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, 8*(1), 24–43.

Silaban, E. C. S., Zahira, S., & Indriyany, I. A. (2026). Pelabelan negatif terhadap ekspresi feminin pada laki-laki: Analisis stigma 'boti' dalam interaksi sehari-hari di media sosial dan ruang publik Indonesia. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry, 1*(4), 41–53.

Solikhin, F., & Hanjani, V. P. (2025). Melampaui maskulinitas tradisional: Pelabelan 'boti' pada laki-laki pengguna kosmetik. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 20*(1), 155–168.

Wahyuni, S. (2023). Ketahanan keluarga perempuan tomboy di Kecamatan Ranah Pesisir perspektif hukum Islam. *Jurnal Cerdas Hukum, 2*(1), 30–36.